

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Etika Politik Rangkap Jabatan di Indonesia Studi Kasus Rangkap Jabatan di Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sudut pandang atau perspektif etika politik terhadap rangkap jabatan di Indonesia khususnya praktik rangkap jabatan yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur atau studi kepustakaan dengan menggunakan teknik analisis data versi Miles dan Huberman dengan data primer dan sekunder yang bersumber pada buku dan berita dari media online yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa setiap pejabat publik memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada setiap jabatan. Oleh karena itu, sangat tidak etis, jabatan publik yang diemban oleh setiap orang namun disaat yang sama juga memiliki jabatan yang lainnya, karena setiap jabatan memiliki kekuasaan baik itu *scope of power* maupun *domain of power* tersendiri kemudian dilihat dari perspektif manapun baik itu Etika Penyelenggaraan Negara, Etika Pemerintahan maupun Etika Politik, Rangkap Jabatan pada dasarnya dilarang karena Praktik Rangkap Jabatan dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of Power*), benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), dan keduanya berujung kepada tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Badan usaha milik negara, etika politik, rangkap jabatan.